

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Dalam sistem perekonomian nasional terdapat tiga pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Perekonomian nasional mempunyai tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat (banyak) bukan kemakmuran seorang. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa badan usaha yang sesuai adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya. Kesejahteraan anggota akan tercapai bila anggota mendapatkan manfaat ekonomi dari koperasi. Dengan demikian tugas pokok koperasi adalah memberikan kesejahteraan ekonomi anggota untuk menuju kepada keadaan ekonomi yang lebih baik dengan indikator terjadinya peningkatan pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ramudi Ariffin (2010) “tujuan ekonomi koperasi dapat dioperasionalkan sebagai meningkatkan pendapatan anggota. Bila koperasi berhasil meningkatkan pendapatan anggota maka kesejahteraan (ekonomi) anggota akan meningkat”. Lebih lanjut dikatakan pendapatan dikategorikan ke dalam pendapatan nominal dan pendapatan riil di mana bila anggota adalah konsumen yang membeli barang/jasa kebutuhan dari pasar maka tujuan koperasi untuk meningkatkan daya beli anggota.

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung atau disingkat KPKB berada di Jalan Wastukencana No. 5 (belakang) Bandung. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung merupakan koperasi yang berdiri berdasarkan kesamaan kebutuhan anggotanya sebagai Pegawai Negeri Kota Bandung di mana anggota koperasi merupakan konsumen.

Sesuai dengan anggota koperasi yaitu konsumen dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan daya beli anggota di bidang jasa/perdagangan maka Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung menyediakan unit usaha yang sesuai yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Niaga dan Unit Usaha Jasa Lainnya. Dalam menjalankan unit usahanya Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung memerlukan modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha

serta kegiatan operasional koperasi, Penggunaan modal koperasi untuk keperluan kegiatan usaha dikelola untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal yaitu berupa sisa hasil usaha.

Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam permodalannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 41 yaitu modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut merupakan perkembangan modal sendiri, modal asing Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Modal Sendiri dan Modal Asing Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Periode 2012-2017

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	N/T	Modal Pinjaman (Rp)	N/T
2012	30.951.387.606,62		9.040.794.833,46	
2013	35.530.606.182,66	12,89%	9.034.590.314,58	(0,07%)
2014	41.537.549.944,22	14,46%	9.034.590.314,58	0,00%
2015	47.397.291.750,48	12,36%	9.034.590.314,58	0,00%
2016	51.005.418.955,83	6,56%	9.034.590.314,58	0,00%
2017	54.860.718.396,19	7,54%	9.034.590.314,58	0,00%

Dilihat dari Tabel 1.1 diketahui bahwa modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 12,89% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 14,46% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 12,36% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 6,56% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 7,54% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari modal pinjaman yang dimiliki oleh koperasi terjadi penurunan dan cenderung tidak berubah di mana pada tahun 2013 modal pinjaman koperasi

mengalami penurunan sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya, kemudian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak terjadi perubahan di mana besar modal pinjaman tetap sama yaitu sebesar Rp. 9.034.590.314,58 hal tersebut dikarenakan adanya modal penyertaan dari Pemkot Bandung di mana modal penyertaan tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu yang belum ditentukan dan tidak adanya angsuran tiap tahunnya sehingga jumlahnya tetap sama.

Namun jika dilihat secara keseluruhan dapat dilihat bahwa modal sendiri yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung lebih besar dibandingkan modal pinjamannya. Menurut Bambang Riyanto (2010:293) “Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar”. Hal tersebut mencerminkan bahwa koperasi telah dikatakan mandiri dari segi permodalannya.

Modal yang dimiliki oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aset-aset tetap maupun aset-aset lancar untuk keperluan operasional koperasi. Aset-aset yang dimiliki oleh koperasi harus digunakan secara efisien untuk menghasilkan penjualan dan tingkat pengembalian berupa Sisa Hasil Usaha. Semakin besar penjualan yang diwujudkan oleh koperasi maka semakin efisien penggunaan aset, dan manajemen koperasi harus dapat bertanggung jawab atas aset yang digunakan untuk menghasilkan tingkat pengembalian berupa Sisa Hasil Usaha yang optimal.

Berikut ini merupakan data total aset, penjualan dan sisa hasil usaha yang dimiliki oleh koperasi dari tahun 2012-2017

Tabel 1.2 Perkembangan Total Aset, Penjualan dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung periode 2012-2017

Tahun	Total Aset (Rp)	N/T (%)	Penjualan (Rp)	N/T (%)	SHU (Rp)	N/T (%)
2012	47.132.066.501,16		7.471.863.324,37		2.342.169.026,96	
2013	51.242.140.602,01	8,02	7.640.568.071,52	2,21	300.766.466,21	(678,73)
2014	57.588.315.138,66	11,02	7.987.461.268,54	4,34	268.522.681,03	(12,01)
2015	64.180.744.389,91	10,27	8.726.081.439,48	8,46	302.087.679,70	11,11
2016	68.728.030.217,22	6,62	9.060.391.639,45	3,69	392.740.427,00	23,08
2017	78.591.906.095,84	12,55	10.517.460.346,88	13,85	510.181.516,08	23,02

Dilihat dari perkembangan total aset yang dimiliki koperasi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya hal tersebut juga diikuti oleh perkembangan penjualan yang ikut meningkat setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari Sisa Hasil Usaha mengalami fluktuatif di mana pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 678,73% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali sebesar 12,01% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,11% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 23,08% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 23,02%.

Berdasarkan fenomena tersebut diketahui bahwa kenaikan yang terjadi pada modal dan aset yang dimiliki koperasi tidak sebanding dengan kenaikan SHU yang mengalami fluktuatif. Di mana seharusnya kenaikan besar modal dan aset yang dimiliki koperasi diimbangi dengan kenaikan tingkat pengembalian yaitu Sisa Hasil Usaha. Untuk itu perlu dilakukan analisis kinerja keuangan sehingga didapatkan gambaran bagaimana kinerja koperasi yang sebenarnya. Kinerja keuangan koperasi diperlukan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan

meningkatkan kesejahteraan anggota serta kemampuan untuk membayar hutang. Salah satu kinerja keuangan koperasi dapat dilakukan melalui Analisis Rasio Keuangan

Salah satu analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan koperasi adalah rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan koperasi memberikan manfaat atas modal yang di investasikan anggotanya. Salah satu analisis rasio profitabilitas yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui efisiensi manajemen koperasi adalah rasio manfaat atas modal atau ekuitas (Hendar : 2010). Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian terhadap investasi anggota. Sebagai pemilik modal, anggota berharap mendapatkan pengembalian yang sesuai dengan modal yang ditanamkan. Anggota koperasi cenderung tertarik menanamkan modalnya kepada koperasi apabila investasi yang dilakukan anggota kepada koperasi memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Berikut ini merupakan perbandingan rasio manfaat atas modal (ekuitas) koperasi dengan suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI Rate) di mana BI Rate digunakan sebagai suku bunga acuan untuk tingkat suku bunga deposito bank. Selain membandingkan suku bunga, rasio manfaat atas modal (ekuitas) juga dibandingkan dengan tingkat inflasi untuk mengetahui bahwa modal yang ditanamkan anggota akan menghasilkan nilai yang lebih besar untuk menutupi inflasi dalam kaitannya dengan efisiensi manajemen koperasi dalam pembelanjaan perusahaan koperasi untuk menghasilkan keuntungan.

Tabel 1.3 Perkembangan Rasio profitabilitas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 – 2017

Tahun	Rasio manfaat atas modal	N/T	Suku Bunga	Inflasi
2012	7,57%		5,77%	4,30%
2013	0,85%	(7,94)	6,48%	8,38%
2014	0,65%	(0,31)	7,54%	8,36%
2015	0,64%	(0,01)	7,52%	3,35%
2016	0,77%	0,17	6,00%	3,02%
2017	1,08%	0,28	4,56%	3,61%

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa nilai rasio manfaat atas modal koperasi mengalami fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga dan inflasi pada tahun 2012 koperasi memiliki nilai rasio manfaat atas modal (ekuitas) yang lebih besar yaitu sebesar 7,57% dibandingkan suku bunga (BI Rate) sebesar 5,77%. Hal ini pun dapat dilihat dari rasio manfaat atas modal (ekuitas) koperasi yang dapat menutupi tingkat inflasi yaitu sebesar 4,30%. Hal tersebut menggambarkan bahwa koperasi dapat memberikan tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan anggota diatas suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Namun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 nilai rasio manfaat atas modal (ekuitas) koperasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga maka koperasi tidak dapat memenuhi standar suku bunga Bank Indonesia, serta koperasi tidak mampu menutupi tingkat inflasi dikarenakan nilai rasio manfaat atas modal (ekuitas) yang rendah dibandingkan tingkat suku bunga dan inflasi.

Jika dilihat dari rasio manfaat atas modal (ekuitas) maka hanya dapat diketahui kemampuan koperasi dalam memberikan tingkat pengembalian dari modal sendiri, sedangkan dalam menjalankan usahanya koperasi menggunakan

modal sendiri dan modal pinjaman sehingga perlu juga untuk melakukan perhitungan tingkat pengembalian atas penggunaan modal koperasi secara keseluruhan yang dipakai untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan.

Namun menurut Suropto (2015:1) menjelaskan

“Pengukuran menggunakan rasio-rasio keuangan sudah tidak relevan lagi, karena rasio-rasio keuangan tersebut tidak memberikan gambaran kinerja yang sebenarnya. Rasio-rasio keuangan yang ada sangat tergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan. Pengukuran kinerja berdasarkan data-data akuntansi tidak dapat memberikan informasi nilai tambah yang tercipta dalam periode tertentu. Informasi nilai tambah yang dihasilkan akan memberikan gambaran sejauh mana kinerja perusahaan dalam menciptakan nilai tambah”

Nilai tambah yang dimaksud merupakan kemampuan koperasi dalam membayar semua biaya operasi dan biaya modal sehingga menghasilkan nilai tambah. Maka untuk mengukur kinerja keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yaitu dengan menghitung nilai tambah yang dihasilkan koperasi atas besar modal yang digunakan untuk investasi kegiatan usahanya.

Selain dilihat dari kinerja keuangan koperasi dalam mendapatkan nilai tambah ekonomi, koperasi sebagai organisasi yang didirikan oleh kelompok orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang sama maka dalam keberhasilan menjalankan usahanya ditujukan untuk mensejahterakan pendirinya yaitu anggota.

Menurut Ropke dalam buku Koperasi Sebagai Perusahaan (Ramudi Ariffin 2013:115) “anggota koperasi harus memperoleh dampak ekonomis dari keberadaan koperasinya berupa selisih positif nilai ekonomis dibanding dengan nilai ekonomis yang diperoleh secara individu dipasar”.

Selisih positif yang didapatkan anggota dapat berupa manfaat atas harga yang ditawarkan koperasi kepada anggota atau disebut dengan manfaat ekonomi

langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung yaitu berupa sisa hasil usaha yang diberikan koperasi atas dasar partisipasi anggota di koperasi.

Manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota akan berpengaruh terhadap partisipasi anggota. Jika anggota mendapatkan manfaat ekonomi dari koperasi maka partisipasi anggota akan meningkat dan sebaliknya jika anggota tidak merasakan adanya manfaat ekonomi dari koperasi maka partisipasi anggota akan melemah atau hilang. Partisipasi anggota menentukan dalam perkembangan koperasi di mana anggota berpartisipasi sebagai pemilik juga sebagai berpartisipasi sebagai pelanggan. Tanpa adanya partisipasi dari anggota maka koperasi tidak akan bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan koperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan adanya penilaian kinerja koperasi di mana koperasi dalam pelaksanaannya memberikan nilai tambah sebagai ukuran kinerja keuangan koperasi sudah baik atau belum serta mengukur manfaat ekonomi anggota untuk melihat apakah koperasi memberikan nilai tambah bagi anggotanya. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI DAN KAITANNYA DENGAN MANFAAT EKONOMI ANGGOTA”**

IKOPIN

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung periode 2012-2017
2. Bagaimana Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan manfaat ekonomi bagi anggota
3. Bagaimana keterkaitan antara hasil kinerja keuangan dengan manfaat ekonomi anggota pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) serta mengetahui koperasi dalam memberikan nilai tambah bagi anggota dengan mengukur manfaat ekonomi anggota yang diberikan koperasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung periode 2012-2017
2. Manfaat ekonomi anggota yang diberikan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung
3. Keterkaitan hasil kinerja keuangan dengan manfaat ekonomi anggota pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung periode 2012-2017

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aspek pengembangan ilmu dan aspek guna laksana:

1. Aspek Pengembangan Ilmu
 - a. Bagi peneliti untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen keuangan khususnya penilaian kinerja keuangan pada koperasi dan manfaat ekonomi anggota
 - b. Bagi peneliti lain dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai aspek yang diteliti
2. Aspek Guna Laksana

Bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) memberikan manfaat serta gambaran mengenai kinerja keuangan koperasi pada periode yang diteliti dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan dimasa yang akan datang

IKOPIN